

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2000. *Metode penelitian hukum*. Jakarta :Sinar Grafik.

Amirudin dan Zainal Asdikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Asshidiqqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Asshidiqqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Asshidiqqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press

Budihardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Busroh Abu Daud.1983.*Asas-asas Hukum Tata Negara*.Jakarta: Gahlia Indonesia

Fuady Munir. 2011. *Teori Negara hukum Modern*, Bandung : PT. Refika Aditama

Ghoffar, Abdul .2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara Maju*, Jakarta :Kencana Penada Media Group.

Hamidi, Jazim,.2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung : PT. Alumni

Huda, Ni'matul, 2005. *Hukum Tata Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Isra, Saldi,. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada



Mahfud, Moh MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Mahfud. Moh. MD,2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sukma Rizal. 1999. Hubungan Sipil-Militer dan transisi demokrasi di Indonesia. Jakarta: Centre for strategic and International Studies (CSIS).

Siahaan ,Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*,Jakarta; Konpress

Soerjono,Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press

Suharto, Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Wahyudi ,Alwi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
3. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri
4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
5. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
6. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

C. Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

1. Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap UUD 1945.

2. Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang Pertimbangan DPR dalam rangka pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden
3. Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang Pertimbangan DPR dalam rangka pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/ 2015

D. Website

1. Redaksi, “Akhiri Masa Bakti 2009-2014, DPR Hasilkan 126 Undang-Undang”
<http://www.merdeka.com/politik/akhiri-masa-bakti-2009-2014-dpr-hasilkan-126-undang-undang.html>, diakses tanggal 9 Agustus 2015.
2. https://www.google.com/search?q=sistem+presidensial+menurut+douglas+v+verney&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&gws_rd=ssl
3. <http://bosmansultra.blogspot.com/2014/10/hak-prerogatif.html>, diakses tanggal 8 Agustus 2015
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepangkatan_Tentara_Nasional_Indonesia

E. Makalah

1. Makalah Peserta Call Paper Panel III pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke II dengan tema “ menata Proses seleksi Pimpinan Lembaga Negara”, Padang, 11- 12 September 2015.
2. Tulisan Tudung Mulya Lubis dalam makalah Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke II dengan tema “ menata proses seleksi pimpinan lembaga negara”

yang dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*
: *Pasca Reformasi*, Jakarta; PT.Bhuana ilmu Popular, 2007, hlm.335.

